

**DISERTASI
HAK KREDITOR KONKUREN DALAM
HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

**GILANG FITRI HERMAWAN
2341214310011**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026**

DISERTASI
HAK KREDITOR KONKUREN DALAM
HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Oleh :

NAMA : GILANG FITRI HERMAWAN
NIM 2341214310011

Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi : Hak Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan Indonesia
Nama : Gilang Fitri Hermawan
NIM : 2341214310011

Disetujui untuk Ujian Terbuka,
Pada Tanggal... **31 MARET 2026**

Promotor

Co- Promotor



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.



Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.

Plt. Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Fitri Hermawan
NIM : 2341214310011
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : **"HAK KREDITOR KONKUREN DALAM HUKUM
KEPAILITAN"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarbaru, 31 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Gilang Fitri Hermawan
NIM 2341214310011



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

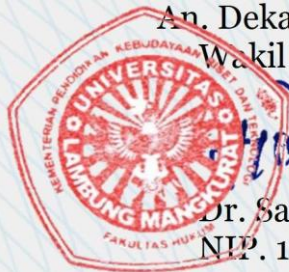
GILANG FITRI HERMAWAN
2341214310011

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

4 %

Banjarmasin, 10 Maret 2025

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

[Signature]
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan pemilik alam semesta ini karena atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun Disertasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat ini dengan judul “HAK KREDITOR KONKUREN DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Disertasi ini. Diselesaikannya Disertasi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM sekaligus Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., M.H. selaku Co. Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi, dan catatan-catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
4. Seluruh Dosen pengasuh matakuliah di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
5. Segenap Staf Akademik, kemahasiswaan, keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM, Terkhusus Abangnda Rizki Hermawan.
6. Orangtua, Darmawan & Herlina Roosmiyati, S.Pd. yang selalu memberikan semangat, doa serta motivasi yang tiada henti sehingga dapat penulis menyelesaikan penelitian ini.
7. Istri tercinta penulis, Risa Maulida, S.M., Saudara Penulis, Dr. Muhammad Bayu Hermawan, S.H., M.H., Bripda Areo Galang Ikhwani, Muhammad Galih Akmal, Dr. Ridha Darmawaty, S.Pd., M.Pd. yang menjadi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman penulis di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM angkatan III dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 31 Maret 2026
Penulis

Gilang Fitri Hermawan

RINGKASAN

Oleh:

Gilang Fitri Hermawan

**Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Lambung
Mangkurat**

Ringkasan Penelitian

Disertasi ini membahas kedudukan dan perlindungan hak kreditur konkuren dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketidakseimbangan dalam struktur pembagian harta pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana kreditur konkuren berada pada posisi terakhir dalam hierarki pembayaran setelah kreditur separatis dan kreditur preferen. Dalam praktik kepailitan, kondisi tersebut sering menyebabkan kreditur konkuren tidak memperoleh bagian dari boedel pailit atau hanya menerima bagian yang sangat terbatas, sehingga menimbulkan persoalan keadilan distributif dan efektivitas perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori hak, teori keadilan distributif, dan teori kepastian hukum sebagai landasan analisis terhadap struktur pembagian kreditur dan perlindungan hukum yang tersedia. Untuk memperkaya analisis, dilakukan pula studi perbandingan dengan sistem kepailitan Belanda, Singapura, dan Amerika Serikat guna melihat bagaimana yurisdiksi lain mengatur perlindungan terhadap kreditur tanpa jaminan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pembagian kreditur dalam hukum kepailitan Indonesia bersifat hierarkis dengan pengakuan terhadap pengecualian berupa hak jaminan kebendaan dan hak preferen tertentu. Meskipun pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum secara formal, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif, khususnya bagi kreditur konkuren yang berada pada posisi paling lemah dalam struktur pembayaran. Perluasan hak preferen, termasuk hak mendahului negara atas pajak, berpotensi mempersempit bahkan meniadakan hak pemulihan kreditur konkuren.

Sebagai kontribusi teoretis dan normatif, disertasi ini menawarkan rekonstruksi pengaturan hak kreditur konkuren melalui penataan ulang struktur prioritas secara proporsional, pembentukan mekanisme perlindungan minimum atas boedel pailit umum, serta penguatan transparansi dan pengawasan dalam proses kepailitan. Rekonstruksi ini tidak menghapus hak kreditur separatis maupun kepentingan negara, melainkan menempatkannya dalam kerangka kolektivitas kepailitan yang lebih seimbang dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum kepailitan nasional agar lebih responsif terhadap perlindungan kreditur konkuren dan mendukung stabilitas sistem ekonomi.

SUMMARY

By:

Gilang Fitri Hermawan

Doctoral Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University

This dissertation examines the legal position and protection of concurrent creditors under Indonesian bankruptcy law, with particular emphasis on the distribution of the bankruptcy estate and the extent to which the current system ensures fair treatment for unsecured creditors. Under Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), concurrent creditors are placed at the lowest level of priority after secured creditors and preferred creditors. In practice, this hierarchical distribution frequently results in concurrent creditors receiving only a minimal recovery or no recovery at all, raising significant concerns regarding distributive justice and the effectiveness of legal protection in Indonesian insolvency proceedings.

This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is supported by a theoretical framework consisting of the theory of rights, the theory of justice (distributive justice), and the theory of legal certainty. In order to strengthen the assessment and develop a more comprehensive reform model, the dissertation also conducts a comparative study of the insolvency systems of the Netherlands, Singapore, and the United States, particularly regarding the treatment of unsecured creditors, the limitation of preferential claims, and procedural mechanisms that enhance creditor participation and transparency.

The findings demonstrate that the essence of creditor classification and distribution in Indonesian bankruptcy law is fundamentally hierarchical, reflecting exceptions to the general principle of equal distribution. Although the statutory framework provides formal legal certainty through a clearly structured priority system, its practical implementation does not fully realize distributive justice, especially for concurrent creditors who occupy the weakest structural position. The expansion of preferential claims, including the state's priority rights for tax obligations, may significantly reduce or even eliminate the possibility of recovery for concurrent creditors, thereby undermining the collective and equitable nature of bankruptcy as a legal mechanism for debt settlement.

As a theoretical and normative contribution, this dissertation proposes a reconstruction of the legal protection for concurrent creditors through a more proportionate priority structure, the establishment of a minimum distribution mechanism for concurrent creditors from the general bankruptcy estate, and the strengthening of transparency and supervision in estate administration. This reconstruction does not seek to abolish the rights of secured creditors or the legitimate fiscal interests of the state, but rather to integrate them within a more balanced collective insolvency framework. The proposed reconstruction is expected to contribute to the development of Indonesian bankruptcy law toward a more just, transparent, and effective system, while also supporting broader economic stability through enhanced confidence in insolvency proceedings.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hak Kreditur Konkuren dalam hukum kepailitan Indonesia dengan fokus pada tiga isu utama, yaitu: (1) hakikat pembagian kreditur dalam hukum kepailitan Indonesia; (2) apakah pengaturan pembagian harta pailit telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur yang bersengketa; serta (3) bagaimana rekonstruksi pengaturan hak Kreditur Konkuren dalam sistem kepailitan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian kreditur dalam kepailitan Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis, dengan Kreditur Konkuren berada pada posisi terakhir setelah kreditur separatis dan kreditur preferen. Meskipun pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum secara formal melalui struktur prioritas pembayaran yang jelas, dalam praktiknya pengaturan pembagian harta pailit belum sepenuhnya mewujudkan keadilan distributif, khususnya bagi Kreditur Konkuren. Perluasan preferensi tertentu, termasuk hak mendahului negara atas pajak, berpotensi mengurangi bahkan meniadakan pemulihan bagi Kreditur Konkuren, sehingga prinsip pembagian seimbang dalam kepailitan cenderung bekerja secara residual.

Penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan hak Kreditur Konkuren melalui penataan ulang struktur prioritas pembayaran secara proporsional, pembentukan mekanisme perlindungan minimum atas boedel pailit umum bagi Kreditur Konkuren, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberesan harta pailit. Rekonstruksi tersebut tetap mempertahankan keberadaan hak kreditur separatis dan kepentingan negara, namun menempatkannya dalam kerangka kolektivitas kepailitan yang lebih seimbang, sehingga perlindungan hak Kreditur Konkuren tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam praktik.

Kata Kunci: Kreditur Konkuren, Kepailitan, Pembagian Harta Pailit, Perlindungan Hukum, Rekonstruksi Hukum.

ABSTRACT

This dissertation examines the legal position and protection of concurrent creditors under Indonesian bankruptcy law, focusing on three principal issues: (1) the nature of creditor distribution within the Indonesian bankruptcy system; (2) whether the existing regulation on the distribution of the bankruptcy estate ensures legal certainty and justice for disputing creditors; and (3) how the legal protection of concurrent creditors can be reconstructed within the current bankruptcy framework. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches.

The findings demonstrate that the Indonesian bankruptcy system adopts a hierarchical structure of creditor classification, placing concurrent creditors in the lowest priority after secured and preferred creditors. Although the statutory framework under Law Number 37 of 2004 provides formal legal certainty through a clearly defined priority system, its practical implementation does not fully realize distributive justice, particularly for concurrent creditors. The expansion of preferential claims, including the state's priority over tax obligations, may significantly reduce or even eliminate recovery for concurrent creditors, thereby weakening the principle of proportional distribution in bankruptcy proceedings.

This dissertation proposes a reconstruction of concurrent creditors' rights through a more proportionate limitation of preferential claims, the establishment of a minimum distribution mechanism from the general bankruptcy estate for concurrent creditors, and the strengthening of transparency and accountability in estate administration. This reconstruction does not abolish the rights of secured creditors or the legitimate fiscal interests of the state, but rather integrates them within a more balanced collective insolvency framework. The proposed model aims to enhance substantive justice, legal certainty, and systemic fairness within Indonesian bankruptcy law.

Keywords: *Concurrent Creditors, Indonesian Bankruptcy Law, Distribution of Bankruptcy Estate, Legal Protection, Legal Reconstruction.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (COVER)	i
HALAMAN DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
D. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kerangka Teoritik	19
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Hak.....	20
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Keadilan.....	50
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Kepastian Hukum	75

B. Landasan Konseptual	83
C. Bagan Kerangka Pikir	88
D. Definisi Operasional/Konseptual	89
BAB III : METODE PENELITIAN	92
A. Jenis Penelitian.....	92
B. Sifat Penelitian	93
C. Tipe dan Pendekatan penelitian	94
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	97
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	99
F. Analisis Bahan Hukum	99
G. Sistematika Penulisan	100
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	102
A. Hakikat Pembagian Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan Indonesia.....	102
1. Hakikat Pembagian Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia	102
2. Sejarah Klasifikasi Kreditor dalam Hukum Kepailitan.....	114
3. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Pailit.....	148
B. Perlindungan Hak Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan.....	174
1. Pengaturan Pembagian Harta Pailit dalam Perspektif Keadilan.....	174
2. Keadilan bagi Kreditor Konkuren dalam Struktur Prioritas Pembayaran	215
3. Perlindungan Terhadap Kreditor Konkuren dalam Proses Kepailitan	242
C. Rekonstruksi Hak Kreditor Konkuren Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU.....	256
1. Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU	256
2. Perbandingan Pengaturan Hak Kreditor Konkuren Dengan Negara Lain	268

3. Rekonstruksi Hak Kreditor Konkuren Berdasarkan Tujuan Hukum yang Berkeadilan.....	285
BAB V : Penutup	311
A. Kesimpulan.....	316
B. Saran.....	318

DAFTAR PUSTAKA